



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ROKHMAT ZUHRI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **1000674**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.595.685.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 477 m2/112 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp. 333.900.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 387 m2/105 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah Seluas 976 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp. 155.000.000
4. Tanah Seluas 1.922 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
5. Tanah Seluas 1.045 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
6. Tanah Seluas 956 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
7. Tanah Seluas 212 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp. 60.000.000
8. Tanah Seluas 995 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 241.785.000
9. Tanah Seluas 378 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 115.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA AVANZA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000



2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI	Rp.	
3.000.000		
3. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	
6.000.000		
4. MOTOR, HONDA CB Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	16.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.714.685.000
III. HUTANG	Rp.	72.800.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.641.885.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.